

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Istilah "menyulam" dalam judul penelitian ini, *Menyulam Masjid dan Bangsa*, digunakan sebagai metafora analitis untuk menggambarkan proses historis yang gradual, berlapis, dan tidak selalu berlangsung secara terbuka, ketika ruang masjid kampus dihubungkan dengan horizon kebangsaan Indonesia. Masjid dalam penelitian ini tidak hanya menunjuk pada bangunan fisik atau tempat ibadah, tetapi pada arena dakwah, *halaqah*, *tarbiyah*, kajian, dan pembentukan kesadaran moral mahasiswa Muslim. Sementara itu, bangsa menunjuk pada medan tanggung jawab sosial-politik yang lebih luas: rakyat, keadilan, krisis moralitas, reformasi, kemajemukan, dan masa depan Indonesia. Dengan demikian, "menyulam masjid dan bangsa" berarti menelusuri bagaimana LDK secara perlahan menghubungkan pembinaan keislaman kampus dengan artikulasi tanggung jawab kebangsaan, hingga orientasi tersebut mengkristal secara publik melalui KAMMI menjelang Reformasi.

Periode transisi menjelang runtuhnya rezim Orde Baru pada akhir 1990-an merupakan momen krusial dalam sejarah Indonesia modern. Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara sejak pertengahan 1997 tidak hanya mengguncang stabilitas ekonomi Indonesia, tetapi juga membuka ruang bagi gelombang protes masif yang menuntut reformasi politik dan demokratisasi.

Dalam narasi besar tentang Reformasi 1998, gerakan mahasiswa sering digambarkan sebagai aktor utama yang mendorong jatuhnya Soeharto melalui aksi-aksi demonstrasi jalanan, okupasi gedung DPR/MPR, dan mobilisasi massa yang meluas di berbagai kota besar Indonesia (Aspinall, 2005). Namun, di balik narasi politik yang dominan tersebut, terdapat dinamika intelektual dan kultural yang berlangsung secara lebih senyap namun tidak kalah penting dalam membentuk kesadaran politik generasi mahasiswa pada periode tersebut.

Salah satu ruang yang memainkan peran signifikan dalam proses pembentukan kesadaran tersebut adalah masjid kampus, yang pada dekade 1990-an telah berkembang menjadi pusat aktivitas intelektual dan keagamaan

mahasiswa Muslim. Berbeda dengan periode 1970-an dan 1980-an ketika gerakan mahasiswa masih dapat menggunakan jalur organisasi kemahasiswaan ekstra-kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kebijakan depolitisasi kampus yang diberlakukan melalui Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) sejak 1978 telah secara efektif membatasi ruang gerak politik mahasiswa di Indonesia (Lane, 2008; Uhlin, 1997). Dalam konteks pembatasan tersebut, masjid kampus yang dikelola melalui Lembaga *Dakwah* Kampus (LDK) muncul sebagai arena diskursif Islam yang relatif aman dari intervensi negara, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa Muslim untuk membicarakan persoalan yang melampaui ritual keagamaan semata.

Yang menjadikan fenomena ini memiliki dimensi nasional adalah terbentuknya Forum Silaturahmi Lembaga *Dakwah* Kampus (FSLDK) pada 1986, sebuah jaringan koordinasi yang menghubungkan LDK dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, sehingga apa yang berkembang di masjid kampus bukan fenomena lokal Jabodetabek, melainkan gejala nasional yang terkonsolidasi (Machmudi, 2008; Rahmat, 2005; Prayogi, 2019).

Lembaga *Dakwah* Kampus sendiri memiliki akar historis yang dapat ditelusuri hingga berdirinya Masjid Salman Institut Teknologi Bandung pada 1972 di bawah bimbingan Imaduddin Abdulrahim. Yang menarik secara historis adalah cara Imaduddin mengadaptasi model pembinaan sel kecil (*usrah*) dari gerakan *Ikhwanul Muslimin* Mesir, yang dalam konteks Mesir beroperasi secara klandestin karena tekanan rezim Nasser, ke dalam konteks kampus Indonesia. Imaduddin secara brilian melembagakan model sel kecil tersebut ke dalam institusi masjid kampus yang justru mendapat legitimasi dari negara. Adaptasi strategis inilah, mengambil metode pembinaan *Ikhwan* tetapi membungkusnya dalam institusi yang legal, yang menjadi cikal bakal *halaqah* sebagai sistem pedagogis LDK yang kemudian menyebar ke seluruh Indonesia (Hefner, 2000; Liddle, 1996).

Pada awal 1980-an, aktivitas *dakwah* kampus mulai mendapat pengaruh ideologis yang lebih sistematis dari gerakan *Ikhwanul Muslimin* melalui konsep *tarbiyah* (pendidikan atau pembinaan) yang menekankan pembentukan

kepribadian Islam secara ideologis. Pertemuan antara tradisi *dakwah* kampus lokal dengan wacana revivalisme Islam global inilah yang membentuk karakter LDK pada dekade 1990-an (Machmudi, 2008; Federspiel, 2006; Rahmat, 2005).

Namun demikian, perkembangan LDK pada periode 1990–2000 memiliki kekhasan tersendiri. Pada dekade ini, aktivitas LDK mulai menunjukkan kesadaran sosial-politik yang lebih eksplisit. Melalui forum kajian, buletin kampus, *halaqah*, dan pelatihan kader, LDK berkembang menjadi ruang produksi gagasan yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial-politik Indonesia. Proses intelektual ini berlangsung dalam situasi di mana legitimasi negara Orde Baru semakin terkikis dan tuntutan demokratisasi semakin mendesak (Rahmat, 2005; Machmudi, 2008).

Untuk menempatkan LDK dalam lanskap intelektual Islam Indonesia yang lebih luas, penting dicatat bahwa dari rahim gerakan mahasiswa Muslim yang sama dapat lahir orientasi intelektual yang sangat berbeda. Dua dekade sebelumnya, aktivis HMI seperti Nurcholish Madjid merintis jalur Islam inklusif-kultural dengan gagasan 'Islam yes, partai Islam no', menunjukkan bahwa diskursus keislaman kampus tidak bermuara tunggal (Barton, 1999; Latif, 2005). Pasca-Reformasi, divergensi itu semakin nyata: tokoh-tokoh yang dibesarkan dalam jaringan *tarbiyah* kampus mendirikan Partai Keadilan (PK/PKS), sementara arus lain mengkristal dalam Jaringan Islam Liberal (JIL). Bahwa dua kutub ini lahir dari satu generasi dan satu konteks, yaitu kebangkitan Islam kampus dekade 1990-an, justru menegaskan pentingnya periode 1990–2000 sebagai fase formatif yang menentukan (Latif, 2005; van Bruinessen, 2013).

Perlu ditegaskan sejak awal mengenai penggunaan istilah periode 1990–2000 dalam penelitian ini ditetapkan sebagai periode analitis, bukan sebagai klaim bahwa LDK atau gerakan *tarbiyah* baru muncul pada tahun 1990. Akar historis LDK tetap ditelusuri ke dekade 1970-an melalui Masjid Salman ITB, kebijakan NKK/BKK sejak 1978, serta konsolidasi jaringan FSLDK pada 1986, sebagaimana diuraikan pada Bab II. Fase pra-1990 dalam penelitian ini diperlakukan sebagai genealogi konteks, yaitu latar yang menjelaskan bagaimana LDK dapat berkembang menjadi arena produksi gagasan pada dekade berikutnya. Fokus utama penelitian dimulai pada 1990 karena pada dekade inilah infrastruktur

dakwah kampus, sistem *halaqah*, jaringan FSLDK, medium kajian, serta bahasa moral-keislaman mahasiswa Muslim telah cukup mapan untuk dianalisis sebagai proses formasi gagasan kebangsaan. Dengan demikian, tahun 1990 dipahami sebagai titik masuk ke fase pematangan, bukan sebagai titik kelahiran.

Tahun 2000 dipilih sebagai batas akhir karena setelah Reformasi 1998, orientasi moral-kebangsaan yang sebelumnya dibentuk dalam ruang LDK/*tarbiyah* mulai tampil secara publik melalui KAMMI dan bergerak menuju kanal politik formal. Fase 1998–2000 dapat dipahami sebagai *early afterlife* dari gagasan LDK: gagasan yang semula diproduksi dalam *halaqah*, kajian, masjid kampus, dan jaringan FSLDK mulai memperoleh bentuk publik, organisatoris, dan politik yang lebih terbuka. Setelah 2000, medan kajian bergeser dari LDK sebagai arena diskursif kampus menuju sejarah Partai Keadilan/PKS dan politik elektoral Islam, yang berada di luar cakupan penelitian ini. Periode 1990–2000 dengan demikian memungkinkan penelitian ini menangkap satu proses historis yang relatif utuh: pematangan gagasan, artikulasi moral-kebangsaan menjelang krisis Orde Baru, kristalisasi publik melalui KAMMI, dan transisi awal menuju kanal politik formal.

Tabel 1.1 Fase Periodisasi Penelitian

Fase	Status dalam Penelitian	Fungsi Historis
1970-an–1980-an	Genealogi konteks	Menjelaskan akar dakwah kampus, Masjid Salman ITB, NKK/BKK, FSLDK, dan pembentukan infrastruktur awal LDK
1990–1997	Fase pematangan	Menunjukkan mapannya <i>halaqah</i> , <i>tarbiyah</i> , jaringan LDK/FSLDK, dan bahasa moral-keislaman mahasiswa Muslim
1997–1998	Fase akselerasi krisis	Menjelaskan bagaimana krisis Orde Baru mempercepat artikulasi

		publik gagasan moral-kebangsaan
1998–2000	Fase kristalisasi dan <i>early afterlife</i>	Menunjukkan bagaimana gagasan LDK/ <i>Tarbiyah</i> tampil melalui KAMMI dan mulai bergerak menuju kanal politik formal
Pasca-2000	Batas luar kajian	Menandai pergeseran objek dari LDK/ <i>Tarbiyah</i> sebagai arena kampus menuju Partai Keadilan/PKS dan politik elektoral Islam

Sumber: Diolah penulis berdasarkan kerangka periodisasi penelitian.

Persoalan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana di tengah situasi politik yang represif tersebut, aktivis *dakwah* kampus tidak hanya terlibat dalam pembinaan spiritual, tetapi juga dalam proses intelektual yang membentuk cara pandang mahasiswa Muslim terhadap nasionalisme, negara, dan keadilan sosial. Nasionalisme dalam konteks ini dipahami sebagai nasionalisme etis, sebuah bentuk kesadaran kebangsaan yang bertumpu pada nilai moral Islam, tanggung jawab sosial, dan komitmen untuk mewujudkan keadilan di Indonesia, yang tumbuh dari pembacaan kritis terhadap kegagalan Orde Baru sekaligus dari keyakinan bahwa Islam dapat menjadi landasan etis bagi pembangunan bangsa yang lebih baik (Zubaida, 2004; Smith, 2001).

Penelitian tentang gerakan mahasiswa menjelang Reformasi umumnya menempatkan mahasiswa dalam kerangka oposisi politik langsung terhadap negara, sementara dimensi intelektual dan keagamaan mahasiswa Muslim cenderung diabaikan. Studi yang paling mendekati tema penelitian ini adalah disertasi Yon Machmudi; namun fokus utamanya adalah pada transformasi gerakan *tarbiyah* menjadi partai politik setelah Reformasi 1998, sehingga periode 1990–2000 sebagai fase formatif yang otonom belum mendapat perhatian memadai (Aspinall, 2005; Hasan, 2006).

Riset gap yang hendak diisi oleh penelitian ini terletak pada empat aspek. Pertama, dari segi periodisasi, periode 1990–2000 sebagai fase krusial pematangan intelektual aktivis *dakwah* kampus masih kurang tergali. Kedua, dari segi pendekatan, dimensi intelektual dan proses formasi gagasan di ruang-ruang keagamaan kampus terabaikan dalam historiografi yang didominasi perspektif politik-aktivisme. Ketiga, dari segi konseptual, nasionalisme Islam mahasiswa sering direduksi menjadi 'Islamisme' yang monolitik, padahal di dalamnya terdapat kompleksitas gagasan yang perlu dipahami dalam konteks historisnya. Keempat, masjid kampus sebagai arena diskursif Islam yang memproduksi wacana kebangsaan belum dikaji secara memadai dalam historiografi Indonesia (Machmudi, 2008; Fealy dan White, 2008).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, penelitian ini memandang Lembaga *Dakwah* Kampus pada periode 1990–2000 sebagai ruang sejarah intelektual yang penting untuk dikaji. Kajian ini berupaya menelusuri bagaimana gagasan keislaman dan kebangsaan dirumuskan, diproduksi, dan disirkulasikan di lingkungan mahasiswa Muslim menjelang Reformasi, sekaligus menunjukkan bagaimana ruang masjid kampus berfungsi sebagai arena diskursif Islam yang berkembang di luar struktur formal negara namun tetap berkaitan erat dengan dinamika sosial-politik Indonesia pada masa itu (Machmudi, 2008).

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian sejarah intelektual Lembaga *Dakwah* Kampus (LDK) di Indonesia pada periode 1990–2000. Fokus penelitian diarahkan pada aktivitas intelektual dan diskursus keagamaan mahasiswa Muslim yang berlangsung di masjid kampus, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan gagasan nasionalisme Islam. Penelitian ini tidak membahas secara rinci struktur organisasi LDK secara administratif, dinamika internal organisasi secara teknis, maupun perkembangan gerakan politik Islam pasca-Reformasi.

Secara geografis, penelitian ini memandang LDK sebagai fenomena kampus yang berkembang secara nasional melalui jaringan

FSLDK, dengan titik-titik referensi pada kampus-kampus negeri besar sebagai episentrum penyebaran gagasan. Pembatasan ini dimaksudkan agar penelitian terfokus pada analisis gagasan dan wacana dalam dimensi jaringan nasionalnya, bukan pada perbandingan organisasi secara kuantitatif.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana masjid kampus dan Lembaga Dakwah Kampus berkembang sebagai arena diskursif Islam dalam konteks depolitisasi kampus, kebangkitan *tarbiyah*, dan krisis legitimasi Orde Baru pada periode 1990–2000?
- 2) Melalui medium apa saja - buletin, *halaqah*, kajian umum, pelatihan kader, dan jaringan FSLDK - gagasan keislaman dan kebangsaan diproduksi serta disirkulasikan di lingkungan LDK?
- 3) Bagaimana gagasan tentang *amanah*, keadilan, *syura*, *umat*, dan tanggung jawab terhadap bangsa membentuk artikulasi nasionalisme Islam di kalangan aktivis LDK menjelang Reformasi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Merekonstruksi perkembangan masjid kampus dan Lembaga Dakwah Kampus sebagai arena diskursif Islam dalam konteks depolitisasi kampus Orde Baru dan kebangkitan gerakan *tarbiyah* pada periode 1990–2000.
- 2) Menganalisis medium-medium produksi dan sirkulasi gagasan keislaman-kebangsaan dalam aktivitas LDK, meliputi buletin, *halaqah*, kajian umum, pelatihan kader, dan jaringan FSLDK.

- 3) Menjelaskan bagaimana gagasan tentang *amanah*, keadilan, *syura*, *umat*, dan tanggung jawab terhadap bangsa membentuk artikulasi nasionalisme Islam di kalangan aktivis LDK menjelang Reformasi.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah intelektual Indonesia, khususnya dalam pembahasan mengenai peran mahasiswa Muslim dan ruang-ruang keagamaan kampus dalam pembentukan wacana kebangsaan menjelang Reformasi. Secara lebih spesifik, penelitian ini berkontribusi pada pengisian kesenjangan historiografis mengenai periode 1990–2000 sebagai fase formatif gerakan *tarbiyah* yang masih kurang terkaji.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, peneliti, dan pengelola kegiatan kemahasiswaan dalam memahami fungsi masjid kampus sebagai ruang intelektual yang berkontribusi pada pembentukan kesadaran keagamaan dan kebangsaan.

D. Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis sejarah intelektual (*intellectual history*) yang menempatkan gagasan dalam hubungan dialektis dengan aktor dan konteks sosial-historis yang spesifik. Sebagai pendekatan metodologis, penelitian ini mengadopsi kontekstualisme linguistik Quentin Skinner, yang memandang setiap gagasan bukan sebagai entitas abstrak yang berdiri sendiri, melainkan sebagai tindakan bahasa (*speech act*) yang dilakukan oleh aktor historis dalam situasi wacana yang konkret. Kerangka ini dioperasionalkan melalui tiga konsep yang bekerja bersama: arena diskursif Islam (Habermas-Salvatore-Eickelman), intelektual organik (Gramsci), dan nasionalisme etis. Tabel 1.2 merangkum bagaimana keempat elemen ini bekerja secara operasional dalam penelitian ini.

1. Gagasan sebagai Tindakan Historis

Dalam penelitian ini, setiap gagasan yang diproduksi oleh aktivis LDK dipahami bukan sebagai cerminan pasif dari sebuah ideologi, melainkan sebagai tindakan historis yang dilakukan dalam situasi wacana yang konkret. Quentin Skinner berargumen bahwa untuk memahami sebuah gagasan secara historis, sejarawan tidak cukup bertanya 'apa yang dikatakan?' melainkan harus bertanya 'apa yang sedang dilakukan oleh aktor dengan mengatakan hal itu?' (*what was the author doing in saying what they said*). Pertanyaan ini mengharuskan pemahaman atas dua dimensi konteks: pertama, konteks linguistik, repertoar konsep, argumen, dan wacana yang tersedia bagi aktor pada saat itu; kedua, konteks situasional, kondisi sosial, politik, dan intelektual yang mendorong aktor untuk mengucapkan atau menuliskan gagasan tertentu (Skinner, 1969; Skinner, 2002).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut berarti: buletin *dakwah* kampus, materi kajian *halaqah*, dan pidato tokoh LDK tidak dibaca semata-mata untuk mengekstrak isi ideologinya, melainkan sebagai tindakan bahasa yang dilakukan dalam situasi historis yang spesifik, yakni tekanan depolitisasi Orde Baru, kebangkitan revivalisme Islam transnasional, dan krisis legitimasi negara. Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya 'apa yang dipikirkan aktivis LDK tentang nasionalisme?' tetapi 'mengapa mereka mengatakan hal itu, kepada siapa, dan dalam merespons wacana apa?' Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk melampaui deskripsi ideologis menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika formasi gagasan sebagai proses historis yang hidup (Skinner, 1969; Kelley, 1990).

Pilihan atas kontekstualisme Skinner juga didasari pertimbangan bahwa topik penelitian ini secara inheren bersifat polemis, yakni gagasan yang lahir sebagai respons terhadap situasi dan dalam dialog dengan posisi-posisi intelektual lain yang ada pada zamannya, baik posisi negara Orde Baru maupun arus Islam liberal-kultural yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid dan kemudian Ulil

Abshar-Abdalla. Tanpa pemahaman atas konteks polemik ini, makna gagasan nasionalisme Islam LDK tidak dapat dipahami secara utuh (Skinner, 2002).

2. Masjid Kampus sebagai Arena Diskursif Islam

Untuk memahami mengapa masjid kampus dapat berfungsi sebagai pusat produksi gagasan yang melampaui ritual keagamaan, penelitian ini menggunakan konsep ruang publik yang dibangun oleh Jurgen Habermas, dengan modifikasi substansial yang diajukan oleh Armando Salvatore dan Dale Eickelman untuk konteks Muslim. Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai arena di mana individu-individu berkumpul sebagai publik yang merumuskan opini melalui penggunaan akal publik, terpisah dari dominasi negara maupun kepentingan privat (Habermas, 1991).

Namun konsep Habermas mengandung tiga keterbatasan kritis untuk konteks penelitian ini. Pertama, ruang publik Habermas bersifat sekuler secara asumptif, ia mengandaikan bahwa argumentasi rasional di ruang publik harus melepaskan diri dari otoritas keagamaan. Kedua, model tersebut dibangun dari konteks borjuis Eropa abad ke-18 yang tidak dapat diterapkan begitu saja pada konteks masyarakat Muslim Indonesia. Ketiga, Habermas mengasumsikan satu ruang publik yang singular dan homogen, padahal yang terjadi di Indonesia Orde Baru adalah multiplisitas ruang-ruang publik yang beroperasi secara paralel dengan derajat aksesibilitas dan otonomi yang berbeda-beda.

Modifikasi yang diajukan Salvatore dan Eickelman mengatasi keterbatasan ini dengan memperkenalkan konsep 'Islam sebagai agama publik' (*Islam as a public religion*). Mereka menunjukkan bahwa dalam konteks Muslim, bahasa keagamaan bukanlah hambatan terhadap ruang publik rasional melainkan justru mengkonstitusi ruang diskursif publik itu sendiri. Masjid kampus dalam penelitian ini dipahami bukan sekadar sebagai 'ruang publik alternatif' dalam arti Habermasian yang residual, melainkan sebagai arena diskursif Islam (*Islamic discursive arena*), sebuah ruang di mana otoritas keagamaan, argumentasi rasional, dan komitmen

moral beroperasi secara simultan dan tidak terpisahkan, membentuk cara mahasiswa Muslim merumuskan posisi mereka terhadap persoalan kebangsaan (Salvatore dan Eickelman, 2004; Eickelman dan Anderson, 1999).

Konsep arena diskursif Islam ini memungkinkan penelitian untuk memahami dua hal secara bersamaan: mengapa masjid kampus dapat berfungsi sebagai ruang yang relatif otonom dari kontrol negara Orde Baru (karena status keagamaannya memberi perlindungan), dan sekaligus bagaimana wacana yang diproduksi di dalamnya tetap terhubung secara organis dengan dinamika sosial-politik yang lebih luas, karena bahasa keagamaan yang digunakan bukan sekadar bahasa ritual melainkan bahasa moral-politik yang langsung merespons kondisi zaman (Hefner, 2000; Salvatore dan Eickelman, 2004).

3. Aktivis LDK sebagai Produsen Gagasan

Untuk memahami siapa aktor yang memproduksi gagasan di dalam arena diskursif Islam tersebut dan bagaimana relasi mereka dengan komunitas yang lebih luas, penelitian ini menggunakan konsep intelektual organik dari Antonio Gramsci. Gramsci membedakan antara intelektual tradisional, yang mengklaim otonomi dari kelas sosial tertentu, dengan intelektual organik yang secara organis terhubung dengan suatu kelompok sosial dan berfungsi sebagai produsen kesadaran serta konsepsi dunia (*world view*) kelompok tersebut (Gramsci, 1971).

Dalam konteks penelitian ini, aktivis LDK dipahami sebagai intelektual organik yang secara organis terhubung dengan komunitas mahasiswa Muslim. Mereka bukan sekadar pengurus organisasi keagamaan, melainkan produsen gagasan yang melakukan kerja ideologis: menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka yang relevan dengan situasi sosial-politik yang dihadapi oleh mahasiswa Muslim Indonesia, melakukan pribumisasi pemikiran Islam transnasional ke dalam konteks Indonesia, dan merumuskan artikulasi bagi aspirasi moral-politik komunitas yang mereka wakili. Konsep intelektual organik dengan

demikian menjawab pertanyaan 'siapa' dalam kerangka analisis penelitian ini: siapa yang memproduksi gagasan, kepada siapa gagasan itu ditujukan, dan dalam relasi sosial apa produksi gagasan itu berlangsung (Zubaida, 1993; Hilmy, 2010).

4. Nasionalisme Etis sebagai Bahasa Moral-Kebangsaan

Untuk memahami konten gagasan yang diproduksi dan disirkulasikan di dalam arena diskursif Islam oleh para intelektual organik LDK, penelitian ini menggunakan konsep nasionalisme etis. Konsep ini, sebagai alat baca analitis dan bukan sebagai istilah yang niscaya digunakan oleh aktor sejarah, merujuk pada bentuk kesadaran kebangsaan yang tidak bertumpu pada loyalitas primordial kepada simbol-simbol negara (nasionalisme formal) maupun pada agenda formalisasi syariat dalam kerangka negara Islam (Islamisme formal), melainkan pada komitmen moral berbasis nilai-nilai Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dan membangun tatanan kebangsaan yang bermartabat (Smith, 2001; Zubaida, 2004; Anderson, 2006).

Penggunaan konsep nasionalisme etis memungkinkan penelitian untuk menganalisis secara cermat bagaimana aktivis LDK bernegosiasi dengan warisan dikotomi Islam-nasionalisme dalam sejarah Indonesia, antara kubu yang menginginkan negara Islam formal sejak perdebatan konstituante hingga kubu nasionalis Pancasila, dan menghasilkan posisi yang melampaui kedua ujung spektrum tersebut. Nasionalisme etis menjawab pertanyaan 'apa' dalam kerangka analisis penelitian ini: apa konten gagasan yang diproduksi oleh para intelektual organik LDK di dalam arena diskursif Islam masjid kampus (Chatterjee, 1986; Ramage, 1995; Latif, 2005).

Perlu ditegaskan bahwa nasionalisme etis dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai istilah yang secara eksplisit digunakan oleh aktivis LDK, melainkan sebagai kategori analitis peneliti untuk membaca pola gagasan yang muncul dalam bahasa historis para pelaku. Dalam sumber-sumber yang dikaji, aktivis LDK lebih sering menggunakan kosakata seperti

dakwah, amanah, keadilan, syura, umat, masyarakat madani, reformasi total, krisis moralitas, dan tanggung jawab terhadap bangsa. Melalui kosakata inilah orientasi kebangsaan mereka diartikulasikan: *amanah* menjadi bahasa kritik terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan; keadilan menjadi dasar pembacaan terhadap ketimpangan sosial; *syura* menjadi prinsip moral untuk menolak otoritarianisme; *umat* menjadi subjek kolektif yang dipanggil untuk bertanggung jawab; sementara *masyarakat madani* dan tanggung jawab terhadap bangsa menunjukkan bahwa komitmen keislaman diarahkan pada perbaikan Indonesia, bukan pada agenda formalisasi negara Islam.

Penggunaan istilah nasionalisme etis juga dapat diletakkan dalam tradisi pemikiran kebangsaan Indonesia yang membaca nasionalisme bukan sekadar sebagai loyalitas formal kepada negara, melainkan sebagai proyek moral dan etika publik. Dalam konteks ini, karya Yudi Latif tentang genealogi inteligensia Muslim Indonesia membantu menunjukkan bahwa kaum terdidik Muslim memainkan peran penting dalam membentuk bahasa politik, identitas, dan orientasi kebangsaan Indonesia modern (Latif, 2005). Sementara itu, pembacaan Yudi Latif atas Pancasila dalam *Negara Paripurna* memperlihatkan bahwa kebangsaan Indonesia dapat dipahami sebagai medan etis yang menghubungkan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial (Latif, 2011). Dengan demikian, nasionalisme etis dalam skripsi ini tidak dimaksudkan sebagai istilah *emic* aktivis LDK, melainkan sebagai kategori *etic* untuk membaca bagaimana kosakata moral Islam digunakan oleh aktivis LDK/KAMMI untuk mengartikulasikan tanggung jawab terhadap bangsa. Sumber utama untuk membuktikan nasionalisme etis LDK tetap bahasa aktor dalam sumber primer, bukan kerangka Latif itu sendiri, yang berfungsi sebagai penguat tradisi intelektual di mana kategori ini berpijak.

5. Benang Merah: Argumen Utama

Ketiga elemen teoritis di atas, arena diskursif Islam, intelektual organik, dan nasionalisme etis, dirancang untuk bekerja bersama sebagai

satu kerangka analisis yang koheren, bukan sebagai tiga alat yang terpisah. Benang merah yang menghubungkan ketiganya dapat diformulasikan dalam satu argumen utama penelitian ini.

Di dalam arena diskursif Islam yang dibentuk oleh masjid kampus, sebuah ruang yang semi-otonom dari kontrol negara Orde Baru dan beroperasi melalui bahasa keagamaan sebagai medium argumentasi publik (Habermas-Salvatore-Eickelman), aktivis LDK sebagai intelektual organik (Gramsci) memproduksi dan mensirkulasikan gagasan nasionalisme etis sebagai respons terhadap krisis legitimasi Orde Baru dan sebagai alternatif terhadap dua kutub yang dominan: nasionalisme formal Pancasila dan Islamisme formal. Gagasan ini lahir dalam situasi wacana yang spesifik, sebagai tindakan bahasa yang memiliki makna ilokusioner dalam konteks sosial-politiknya (Skinner), dan merepresentasikan salah satu dari dua jalur divergen yang ditempuh oleh generasi intelektual Muslim Indonesia pada dekade 1990-an (Latif, 2005; Hilmy, 2010).

Tabel 1.2 Kerangka Konseptual Operasional

Konsep	Fungsi dalam Skripsi	Sumber yang Dibaca
Gagasan sebagai tindakan historis	Membaca buletin, pidato, dan dokumen LDK sebagai respons kontekstual terhadap Orde Baru — bukan sekadar mengekstrak isi ideologis, melainkan memahami apa yang 'sedang dilakukan' aktor dengan memproduksi teks tersebut	Buletin <i>dakwah</i> kampus, dokumen FSLDK/KAMMI, arsip media sezaman
Masjid kampus sebagai arena diskursif Islam	Menjelaskan mengapa masjid kampus berfungsi	Wawancara alumni LDK, arsip kegiatan

	sebagai ruang produksi wacana keislaman-kebangsaan yang relatif otonom dari kontrol negara Orde Baru	masjid kampus, dokumentasi kajian umum
Aktivis LDK sebagai produsen gagasan	Membaca aktivis LDK bukan hanya sebagai organisator kegiatan keagamaan, tetapi sebagai perumus orientasi moral-politik komunitas mahasiswa Muslim	Wawancara Ahmad Jundi Kholifatullah, Yon Machmudi, Achmal Junmiadi, Ubedilah Badrun, Ade Armando; dokumen organisasi LDK/KAMMI
Nasionalisme etis	Membaca pola gagasan tentang <i>amanah</i> , keadilan, <i>syura</i> , <i>umat</i> , dan tanggung jawab terhadap bangsa sebagai bentuk kesadaran kebangsaan berbasis moral Islam yang berbeda dari nasionalisme formal maupun Islamisme formal	Buletin LDK, materi <i>halaqah</i> , pidato aktivis, arsip Kompas/Tempo/Republika 1997-1998

Sumber: Diolah dari Skinner (1969, 2002); Habermas (1991); Salvatore dan Eickelman (2004); Gramsci (1971); Smith (2001); Zubaida (2004).

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bagaimana setiap konsep dalam kerangka analisis ini memiliki implikasi metodologis yang langsung mengarahkan peneliti

pada jenis sumber tertentu. Dengan cara ini, teori tidak berfungsi sebagai ornamen konseptual, melainkan sebagai alat baca yang operasional dan dapat diverifikasi melalui sumber primer (Hefner, 2000; van Bruinessen, 2013).

Tabel 1.3 Perbandingan Tiga Posisi Intelektual Islam Kampus Indonesia, 1990-an

Dimensi	Nasionalisme Sekuler-Pluralis	Islamisme Formal (Negara Islam)	Nasionalisme Etis LDK
Basis legitimasi	Konstitusi dan Pancasila sebagai final	Syariat Islam sebagai sumber hukum negara	Nilai moral Islam sebagai landasan etis kebangsaan
Sikap terhadap Islam	Islam sebagai agama privat, terpisah dari negara	Islam sebagai sistem politik yang lengkap	Islam sebagai <i>comprehensive way of life</i>
Sikap terhadap NKRI	Pancasila dan NKRI sebagai komitmen tunggal	NKRI sebagai bentuk sementara, perlu diubah	NKRI diterima; kemajemukan diakui; moral Islam memperkuat
Tokoh representatif	Nurcholish Madjid; Ulil Abshar-Abdalla (JIL)	HTI; sebagian gerakan Salafi-Wahabi	Imaduddin Abdulrahim; aktivis LDK-KAMMI
Medium ekspresi	Kampus, media nasional, organisasi sipil	Pengajian, penerbitan, organisasi formal	Masjid kampus, <i>halaqah</i> , buletin, FSLDK

Hasil pasca-Reformasi	JIL; Islam liberal; Islam kultural-pluralis	Organisasi atau partai Islam berbasis syariat	KAMMI (konsep Muslim Negarawan); PKS
--------------------------	---	---	--

Sumber: Diolah dari Latif (2005); Barton (1999); Zubaida (2004); Smith (2001); wawancara narasumber (2026). Tabel ini merangkum posisi analitis peneliti (*etic*), bukan niscaya istilah yang digunakan oleh aktor sejarah.

E. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis, yang meliputi tahapan heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. Metode ini digunakan untuk merekonstruksi dan menganalisis proses terbentuknya gagasan nasionalisme Islam di lingkungan Lembaga *Dakwah* Kampus (LDK) menjelang Reformasi tahun 1990–2000.

a. Heuristik

Tahap heuristik merupakan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber primer meliputi buletin *dakwah* kampus, arsip kegiatan LDK, materi kajian dan *halaqah*, dokumentasi masjid kampus, arsip media massa periode 1990–2000, serta wawancara dengan tokoh dan pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam aktivitas *dakwah* kampus pada periode tersebut, termasuk tokoh-tokoh yang kemudian berperan dalam pembentukan KAMMI dan PKS. Sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal akademik, dan karya ilmiah yang membahas sejarah intelektual, Islam Indonesia, gerakan mahasiswa, dan dinamika sosial-politik Orde Baru.

b. Verifikasi (Kritik Sumber)

Tahap verifikasi dilakukan untuk menilai keaslian, kredibilitas, dan relevansi sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Dalam semangat pendekatan Skinner, verifikasi

tidak hanya menyangkut otentisitas sumber secara formal (kritik eksternal), tetapi juga pemahaman atas konteks wacana di mana sumber tersebut diproduksi: siapa penulisnya, kepada siapa ia berbicara, dan dalam situasi politis apa teks tersebut dihasilkan (kritik internal yang berdimensi kontekstual).

c. Interpretasi

Tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi guna memahami makna dan posisi gagasan nasionalisme Islam dalam aktivitas intelektual Lembaga *Dakwah* Kampus. Sesuai pendekatan Skinner, penafsiran berfokus pada dimensi ilokusioner teks, yakni apa yang sedang dilakukan oleh aktivis LDK dengan memproduksi gagasan tertentu dalam konteks sosial-politik Orde Baru yang spesifik. Kerangka arena diskursif Islam (Habermas-Salvatore-Eickelman), intelektual organik (Gramsci), dan nasionalisme etis digunakan sebagai alat bantu heuristik dalam proses interpretasi ini.

d. Historiografi

Tahap historiografi merupakan proses penulisan sejarah berdasarkan hasil interpretasi terhadap sumber-sumber yang telah dianalisis. Penulisan disusun secara kronologis dan tematik untuk menjelaskan dinamika perkembangan Lembaga *Dakwah* Kampus dan proses formasi nasionalisme Islam di kalangan mahasiswa Muslim menjelang Reformasi. Historiografi diarahkan untuk menampilkan masjid kampus sebagai arena diskursif Islam yang berkontribusi dalam pembentukan kesadaran keislaman dan kebangsaan, sekaligus memperlihatkan posisi LDK dalam lanskap intelektual Islam Indonesia yang lebih luas, termasuk posisinya *vis-a-vis* arus pembaruan Islam yang diwakili oleh Nurcholish Madjid dan kemudian Ulil Abshar-Abdalla.

2. Sumber Penelitian

Bahan sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sumber primer sezaman, meliputi: (1) Majalah Didaktika IKIP Jakarta/UNJ, organ pers mahasiswa umum yang terbit di kampus yang sama dengan LDK IKIP Jakarta. Lima edisi yang digunakan, yaitu Edisi 14 (Maret 1998), Edisi 17 (Juli-September 1999), Edisi 18 (Januari-April 2000), Edisi 19 (2000), dan Edisi 20 (2000), berfungsi sebagai sumber primer sezaman yang mendokumentasikan suasana intelektual kampus dari perspektif pers mahasiswa sekuler-jurnalistik. Perlu ditegaskan bahwa Majalah Didaktika bukan organ resmi LDK, melainkan digunakan sebagai konteks pembanding untuk merekonstruksi atmosfer intelektual dan politik kampus IKIP Jakarta/UNJ pada masa Reformasi, bukan sebagai representasi langsung suara internal LDK; (2) Kumpulan Materi Tarbiyah untuk Ligo dan Mentoring, dokumen internal LDK yang digunakan dalam sistem kaderisasi; serta (3) dokumen organisasi FSLDK dan KAMMI yang dapat diakses melalui sumber-sumber yang tersedia, termasuk arsip yang direproduksi dalam Rahmat dan Najib (2001).
2. Sumber primer lisan retrospektif, yaitu wawancara sejarah lisan yang dilakukan dengan pelaku atau saksi sejarah pada tahun 2026: Ahmad Jundi Kholifatullah (Jakarta, Mei 2026), Yon Machmudi (daring/Zoom, April 2026), Ade Armando (Jakarta, April 2026), Achmal Junmiadi (Bekasi, April 2026), dan Ubedilah Badrun (Jakarta, Mei 2026). Wawancara-wawancara ini dikategorikan sebagai sumber primer lisan retrospektif karena dilakukan jauh setelah peristiwa 1990–2000 berlangsung, sehingga mengandung dimensi ingatan dan refleksi yang harus dipertimbangkan secara kritis melalui triangulasi dengan sumber-sumber lain. Kelima narasumber dipilih secara purposif untuk merepresentasikan posisi yang berbeda: insider tarbiyah (Kholifatullah, Machmudi,

- Junmiadi), perspektif kritis dari luar jaringan (Armando), dan perspektif non-tarbiyah dari kampus yang sama (Badrun).
3. Sumber primer retrospektif pelaku, yaitu *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus* karya Andi Rahmat dan Mukhamad Najib (2001). Buku ini ditulis oleh dua aktivis yang terlibat langsung dalam pendirian KAMMI dan diterbitkan tiga tahun setelah peristiwa berlangsung, sehingga mengandung nilai kesaksian langsung yang tinggi sekaligus bias afirmatif dan ingatan selektif yang harus dipertimbangkan secara kritis. Sumber ini tidak digunakan sebagai otoritas netral, melainkan sebagai bahan untuk membaca cara aktor KAMMI menafsirkan pengalaman mereka sendiri, dan selalu ditriangulasi dengan sumber lain.
 4. Sumber organisasi retrospektif, yaitu Tabloid KAMMI Edisi 1: "KAMMI Berderajat 21" (Maret 2019). Sebagai publikasi yang terbit dua puluh satu tahun setelah peristiwa 1998, ia tidak diperlakukan sebagai sumber primer sezaman. Namun, bagian Fokus Utama tabloid ini mereproduksi leaflet resmi PP KAMMI bertanggal 22 Maret 1999 yang bernilai primer, serta bagian Profil KAMMI memuat reproduksi dokumen resmi pendirian organisasi. Bagian-bagian ini digunakan secara selektif dan selalu ditriangulasi dengan wawancara narasumber, Rahmat dan Najib (2001), dan sumber sekunder lainnya.
 5. Sumber sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang membahas sejarah intelektual, Islam Indonesia, gerakan mahasiswa, dan dinamika sosial-politik menjelang Reformasi.

Tabel 1.4 Status dan Fungsi Sumber Penelitian

Sumber	Status	Fungsi dalam Skripsi
Wawancara narasumber	Sumber lisan retrospektif	Merekonstruksi ingatan pelaku dan saksi tentang kultur LDK/ <i>Tarbiyah</i>
Majalah <i>Didaktika</i> IKIP	Sumber sezaman	Membaca suasana

Jakarta/UNJ 1998–2000	pembanding	intelektual kampus dan konteks Reformasi, bukan sebagai organ resmi LDK
Rahmat & Najib (2001)	Sumber retrospektif pelaku	Membaca narasi awal tentang KAMMI dan transformasi aktivisme mahasiswa Muslim
Tabloid KAMMI (2019)	Sumber organisasi retrospektif	Membaca memori organisasi dan cara KAMMI merekonstruksi sejarah dirinya
Kumpulan Materi <i>Tarbiyah</i>	Dokumen internal/kaderisasi	Membaca struktur nilai, kosakata moral, dan logika pembinaan <i>Tarbiyah</i>

Sumber: Diolah penulis.

